BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

2.1 Sejarah Perusahaan

Didalam dekade 1945-1978, keadaan politik jawatan kehutanan hanya dapat menjalankan tugasnya di Sumatra dan Jawa saja dengan susunan organisasi sangat sederhana. Di Jawa Barat sebagai pimpinan pada waktu itu adalah R.O Nurhadi yang diangkat sebagai Inspektur Kehutanan Bagian I Bandung dengan surat Ketetapan Menteri Depertemen Kemakmuran tanggal 21 Oktober 1945 NO.735/A/Keh. Pada masa revolusi itu tugas pokok jawatan kehutanan adalah turut mempertahankan *defacto* Republik Indonesia dan menyelamatkan harta kekayaan negara bersama militer dan pemerintah sipil lainnya.

Tahun 1947 di Jawa Barat terbentuk Negara Pasundan dan Instansi Kehutanan yang berubah menjadi *De Dienst Van Set Boswezen Negara Pasundan* yang dipimpin oleh Ir.C.Y Moul sampai dengan tahun 1949. Pada tahun ini juga kehutanan mulai disusun secara federatif dan pada pertengahan tahunnya dibentuk satu bagian baru yang disebut Planologi Kehutanan yang terpisah dari pengelolaan dipimpin oleh R.H.Prawiradireja sampai tahun 1952.

Pada tahun 1951 terbit surat keputusan Kepala Jawatan Kehutanan tertanggal 17 November 1951 No.4212 yang memutuskan bahwa terhitung 1 September 1951 dibentuk Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat yang dipimpin oleh R.Oesman Nandika. Peraturan Pemerintah No.20/1952 menetapkan kehutanan di Jawa/Madura dibagi-bagi menjadi beberapa Inspeksi Kehutanan bagian I.

Bertindak menjadi Inspektur pada waktu itu ialah R.Koesnawarso. Pada tahun 1953 Kepala Jawatan Kehutanan dengan surat keputusan tanggal 1 Oktober 1953 No.27777/KD/1/5 mengukuhkan susunan organisasi tiap inspeksi sehingga mempertegas garis komandan dan koordinasi.

Oleh karena pada tahun 1954 M.Saroso meninggal dunia maka R.Oesman Nandika yang semula menjabat Kepala Brigade I Planologi Kehutanan Jawa Barat dan tempatnya kemudian di Brigade diisi oleh Adang Durachman.

Pada tahun 1957 terbit Peraturan Pemerintah No.64/1957 yang menetapkan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dilapangan perikanan laut. Kehutanan dan perkebunan karet rakyat berubahlah status Inspeksi Kehutanan Bagian I menjadi Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jawa Barat R.Oesman Nandika selaku Kepala Dinas yang pertama yang menduduki jabatan sampai tahun 1971.

Pada awal tahun 1971 sampai Mei 1971 Dinas Kehutanan propinsi daerah tingkat I JawaBarat dipimpin oleh Ir.Sulaeman Partadisastra yang selanjutnya digantikan oleh Rd.Usman Mu'min B.Sc sebagai pejabat Kepala Dinas Definitif sampai akhir bulan Februari 1978.

Akan halnya Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat peiode 1961-1971 mengalami dua kali pergantian yaitu Ir.Yunus Kartasubrata dan Andi Abdul Riva'i yang selanjutnya diganti oleh Ir.M.Simbolon sampai awal tahun 1978.

Pada awal tahun 1978 status Dinas Kehutanan propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berubah menjadi unit III Perum Pehutani Jawa Barat berdasarkan Peraturan

Pemerintah No.2 tahun 1978 dengan kepala unit pertama ialah Ir.Suherman Buhron sampai tanggal 21 Juli 1981.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian yang tertanggal 11 Juni 1981 No.493/Kpts/Op/6/1981 Kepala Unit Perum Perhutani Jawa Barat dijabat oleh bapak Ir.Moch Haerani sampai tanggal 3 Otober 1987 (Kepala Unit yang ke II). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri tanggal 31 Agustus 1987 No.110/Kpts/Op/8/1987 Kepala Unit III Perum Perhutani Jawa Barat oleh Bapak Ir.Effendi Hasnan (Kepala Unit yang ke III). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI pada tanggal 20 Desember 1988 No.64/Kpts/Op/12/1988 terhitung serah terima tanggal 23 Januari 1989 dijabat oleh Ir.Mardjito Haknjosoebroto (Kepala Perum Ke IV). Pada waktu yang sama tahun 1978, Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat pun dilebur kedalam Perum Perhutani Biro Perencanaan Unit III Perum Perhutani Jawa Barat. Berdasarkan KePres No.20 tahun 1983 April 1983 tentang pembentukan Departemen Kehutanan dan sebagai Kehutanan yang pertama ialah Dr.Soejarwo termasuk dalam susunan kabinet pembangunan IV. Dengan terbentuknya Departemen Kehutanan maka tiap-tiap propinsi dibentuk pula kantor wilayah Departemen Kehutanan termasuk di Jawa Barat (Ka.KanWil yang pertama di Jawa Barat ialah R.Usman Mu'min B.Sc selanjutnya diganti oleh Ir.R.Suriadi Suradireja Pejabat Ka KanWil DepHut Jawa Barat).

2.2 Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Dengan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1978 tanggal 3 Februari 1978 Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jawa Barat ditetapkan menjadi Unit III Perum Perhutani di Jawa Barat yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 10 Februari 1978. Seiring dengan itu, dengan pertimbangan keberhasilan tugas fungsi perencanaan Kehutanan Jawa Barat, dengan surat keputusan No.121/Kpts/Org/2/1978 tanggal 27 Februari 1978 Menteri Pertanian menetapkan pula perubahan status, Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat kepada Perum Perhutani. Dalam serah terima urusan perencanaan hutan Jawa Barat kepada Perum Perhutani dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1978.

Tujuan Perum Perhutani sebagai salah satu kesatuan produksi adalah mengadakan usaha-usaha produktif sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah nasional dengan cara melakukan kegiatan produksi di bidang perusahaan kehutanan berupa penanaman, pemeliharaan, eksploitasi, pengelolaan, dan pemasaran hasil hutan. Atas dasar tujuan tersebut maka tugas yang dibebankan kepada Perum Perhutani meliputi dua dasar pokok ialah :

a. Memberikan keuntungan kepada negara dan pemupukan modal perusahaan.
b. Melaksankan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Organisasi dan Pembagian Wilayah

Dengan terbentuknya Unit III Perum Perhutani Jawa Barat itu maka susunan organisasi unit produksi Perhutani yang baru ini terdiri dari kepala Perum

Perhutani seorang Wakil Kepala, 9 Kepala Biro, 23 Kepala Seksi Kantor Unit, 1 Kepala Tata Usaha Biro Perencanaan dan 36 Kepala Sub Seksi masing-masing sebagai berikut :



1. Biro Perencanaan yang membawahi 6 seksi :
   - 1.1 Di kantor unit (SPU, SPPH, SPP).
   - 1.2 Seksi perencanaan hutan Bogor
   - 1.3 Seksi perencanaan hutan Bandung
   - 1.4 Seksi perencanaan hutan Cirebon
2. Biro Produksi yang membawahi 2 seksi :
   - 2.1 Seksi eksploitasi kayu
   - 2.2 Seksi eksploitasi non kayu
3. Biro Pemasaran yang membawahi 3 seksi :
   - 3.1 Seksi Penjualan
   - 3.2 Seksi Pengujian Kayu
   - 3.3 Seksi Analisa Pasar
4. Biro Keamanan dan Agraria dan Humas yang membawahi 3 seksi yaitu :
   - 4.1 Seksi Keamanan
   - 4.2 Seksi Hukum dan Agraria
   - 4.3 Seksi Humas
5. Biro Keuangan membawahi 3 seksi :
   - 5.1 Seksi Anggaran dan Pembelanjaan
   - 5.2 Seksi Akuntansi
   - 5.3 Seksi Data dan Informasi

6. Biro Umum membawahi 2 seksi :

   6.1 Seksi Personalia

   6.2 Seksi Umum dan Perkantoran

7. Biro Teknik dan Perlengkapan membawahi 2 seksi :

   7.1 Seksi Bangunan

   7.2 Seksi Instalansi

8. Biro Industri yang membawahi 2 seksi :

   8.1 Seksi Industri kayu

   8.2 Seksi Industri Non Kayu

9. Biro Pembinaan Hutan membawahi 2 seksi :

   9.1 Seksi Reboisasi dan Rerhabilitasi

   9.2 Seksi pembinaan Lingkungan Hidup

Adapun pembagian wilayah unit III Perum Perhutani Jawa Barat terdiri dari 14 kesatuan pemangkuan hutan (KPH) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), ke 14 KPH itu kemudian dibagi-bagi lagi kedalam 108 bagian. Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) masing-masing dipimpin oleh Asisten Perhutani/KBPKH. Wilayah yang lebih kecil lagi dibawah KBKPH adalah Resort Polisi Hutan (RPH) yang di Unit III Perum Perhutani Jawa Barat berjumlah 386, masing-masing dipimpin oleh Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH).

Wilayah Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten meliputi :

1. Administratur Perhutani/KKPH Banten di Serang.
2. Adminstratur Perhutani/KKPH Bogor di Bogor.

3. Adminstratur Perhutani/KKPH Sukabumi di Sukabumi
4. Adminstratur Perhutani/KKPH Purwakarta di Purwakarta
5. Adminstratur Perhutani/KKPH Cianjur di Cianjur
6. Adminstratur Perhutani/KKPH Bandung Selatan di Bandung
7. Adminstratur Perhutani/KKPH Bandung Utara di Bandung
8. Adminstratur Perhutani/KKPH Garut di Garut
9. Adminstratur Perhutani/KKPH Tasikmalaya di Tasikmalaya

2.4 Bidang Pekerjaan Seksi Data Dan Informasi

1. Ketua Seksi Data dan Informasi
2. Anjun Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data (PPD)
3. Ajun Kasi Bidang Analisa dan Penyajian Informasi (API)
4. Kepala Sub Seksi Pengumpul dan Pengolah Data (PPD)
5. Kepala Sub Seksi Analisa dan Pelaporan
6. Programmer Data Kemajuan Pekerjaan (DKP) dan Sub Sistem Sumber Daya Manusia (SS.SDM)
7. Programmer Data Kemajuan Pekerjaan (DKP) dan Sub Sistem Sarana Prasarana (SS.Sarpra)
8. Programmer Sub Sistem Keuangan (SSK) dan Perangkat Komputer
9. Kepala Urusan Seksi SIM
10. Staf Pelaksana Sub Sistem Pengolah Data
11. Staf Pelaksana SS.Perangkat Komputer
12. Staf Pelaksana Sub Seksi Analisa dan Pelaporan

STRUKTUR ORGANISASI

